

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2025



DAFTAR ISI

BAB I..... 3

PENDAHULUAN 3

1.1.Maksud dan Tujuan 3

1.2 Landasan Hukum 3

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran..... 3

I.3. Sistematika Penulisan 5

BAB II..... 6

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN6

BAB III14

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....14

BAB IV21

PENUTUP.....21



BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025 dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025.

1.1. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dan memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya. Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan yaitu:

- A. Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan
- B. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Tema dan tema Pemerintah Kota Surabaya.
- C. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Berkaitan dengan tugas dan fungsi mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025 adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rangkai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024;
13. Peraturan Walikota No. 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpdp) Kota Surabaya Tahun 2023;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

I.3.Sistematika Penulisan

Sistematika dalam dokumen Perubahan Renja Kecamatan Bubutan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garisbesar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pelaksanaan RENJA Kecamatan Bubutan tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2025, mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2025 Kecamatan Bubutan melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Kecamatan Bubutan mendukung program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel T-C.23.

Sedangkan pada tahun 2025 ini, Kecamatan Bubutan melaksanakan 5 (lima) program yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang akan dilanjutkan pada Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Gambaran evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Tahun 2025.



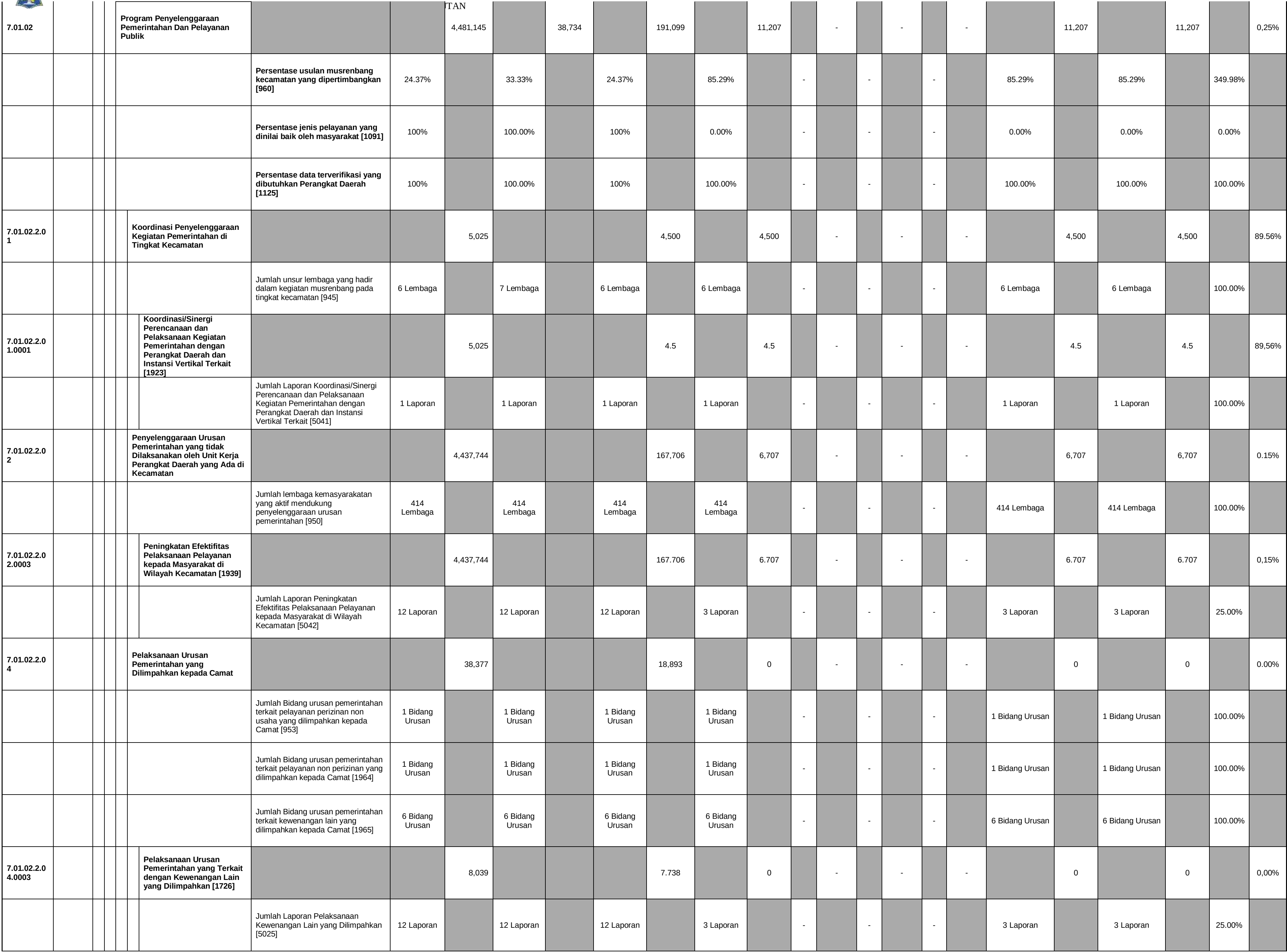


KECAMATAN BUBUTAN

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Bubutan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7		Unsur Kewilayahan																						
7.01			Kecamatan																					
7.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			17,562,376		22,157,243		23,436,792		4,383,984		-		-		-		4,383,984		4,383,984		24,96%
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1389]	96.19%		96.58%		96.12%		98.70%		-		-		-		98.70%		98.70%		102.61%	
7.01.01.2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,957,215				19,752,595		3,557,592		-		-		-		3,557,592		3,557,592		22.29%
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1114]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100%		100%		100.00%	
7.01.01.2.0 2.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1491]			15,957,215				19.752.595		3.557.592		-		-		-		3.557.592		3.557.592		22,29%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5022]	72 Orang/bulan		60 Orang/bulan		55 Orang/bulan		47 Orang/bulan		-		-		-		47 Orang/bulan		47 Orang/bulan		65.28%	
7.01.01.2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,448,920				3,573,363		817,845		-		-		-		817,845		817,845		56.45%
				Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan [1171]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100%		100%		100.00%	
7.01.01.2.0 6.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2288]			1,448,920				3.573.363		817.845		-		-		-		817.845		817.845		56,45%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5043]	36 Paket		29 Paket		36 Paket		15 Paket		-		-		-		15 Paket		15 Paket		41.67%	
7.01.01.2.0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			156,241				110,834		8,547		-		-		-		8,547		8,547		5.47%
				Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan [2148]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100%		100%		100.00%	
7.01.01.2.0 9.0010			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [2294]			156,241				110.834		8.547		-		-		-		8.547		8.547		5,47%
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi [5044]	5 Unit		6 Unit		5 Unit		2 Unit		-		-		-		2 Unit		2 Unit		40.00%	



						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan [1725]			14,259			10.023		0		-		-		-		0		0		0,00%	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan [5024]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.02.2.0 4.0001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha [1724]			16,079			1.132		0		-		-		-		0		0		0,00%	
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan [5023]	40 Dokumen		102 Dokumen		40 Dokumen		31 Dokumen		-		-		-		31 Dokumen		31 Dokumen		77.50%		
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			29,317,470		13,288,621		20,649,017		875,629		-		-		-		875,629		875,629		2,99%
						Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi [807]	100%		62.50%		87.50%		0.00%		-		-		-		0.00%		0.00%		0.00%		
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi [1249]	100%		100.00%		100%		100.00%		-		-		-		100.00%		100.00%		100.00%		
7.01.03.2.0 2						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			29,116,566				20,492,849		875,629		-		-		-		875,629		875,629		3.01%
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya [984]	1 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00%		
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi [2059]	5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		-		0 Kelurahan		0 Kelurahan		0.00%		
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [1784]			2,767,659				2.021.934		0		-		-		-		0		0		0,00%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5030]	6 Unit		6 Unit		6 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [1865]			3,658,766				1.611.278		0		-		-		-		0		0		0,00%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5032]	9 Unit		11 Unit		9 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [1868]			2,787,980				3.876.389		0		-		-		-		0		0		0,00%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5033]	10 Unit		11 Unit		10 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [1870]			4,459,209				2.415.206		0		-		-		-		0		0		0,00%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5034]	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%		
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [1872]			3,505,701				2.751.399		0		-		-		-		0		0		0,00%

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5035]	10 Unit		10 Unit		10 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [1786]		1,166,147				602.509		79.109		-		-		-		79.109		79.109		6,78%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5031]	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [1873]		2,272,583				2.451.376		141.333		-		-		-		141.333		141.333		6,22%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5036]	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [1876]		2,479,471				1.341.540		205.562		-		-		-		205.562		205.562		8,29%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5037]	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [1877]		2,407,099				1.356.600		219.5		-		-		-		219.5		219.5		9,12%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5038]	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [1878]		3,574,386				2.053.817		230.126		-		-		-		230.126		230.126		6,44%
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5039]	3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		3 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0.00%	
7.01.03.2.0 2.0001							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [1888]		37,564				10.8		0		-		-		-		0		0		0,00%
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [5040]	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0.00%	
7.01.03.2.0 3							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		200,904				156,168		0		-		-		-		0		0		0.00%
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan [2269]	44 Lembaga		44 Lembaga		44 Lembaga		0 Lembaga		-		-		-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%	
							Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [2237]	480 Lembaga		440 Lembaga		460 Lembaga		76 Lembaga		-		-		-		76 Lembaga		76 Lembaga		15.83%	
7.01.03.2.0 3.0004							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [1764]		16,079				15.72		0		-		-		-		0		0		0,00%
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [5029]	6 Laporan		6 Laporan		6 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		16.67%	
7.01.03.2.0 3.0003							Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan [4659]		184,826				140.448		0		-		-		-		0		0		0,00%

							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan [6838]	44 Unit		44 Unit		44 Unit		0 Unit		-	-	-	-	0 Unit		0 Unit		0.00%	
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			155,275		113,336		143,153		19,384		-	-	-	-	19,384		19,384		12,48%
						Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan [804]	100%		100.00%		100%		100.00%		-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
7.01.04.2.0 1						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			155,275				143,153		19,384		-	-	-	-	19,384				12,48%
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan [971]	15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		-	-	-	-	15 Lokasi		15 Lokasi		100.00%		
7.01.04.2.0 1.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [1758]			155,275				143.153		19.384		-	-	-	-	19.384		19.384		12,48%
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [5028]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%		
7.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			24,118		7,639		20,947		1,610		-	-	-	-	1,610		1,610		6,67%
						Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan [806]	100%		100.00%		100%		100.00%		-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
7.01.05.2.0 1						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			24,118				20,947		1,610		-	-	-	-	1,610		1,610		6,67%
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional [1966]	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		-	-	-	-	0 Topik		0 Topik		0.00%		
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas [1470]	19 Kasus		30 Kasus		24 Kasus		6 Kasus		-	-	-	-	6 Kasus		6 Kasus		31.58%		
7.01.05.2.0 1.0002						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [1755]			16,079				13.256		0		-	-	-	-	0		0		0,00%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [5026]	120 Orang		20 Orang		120 Orang		0 Orang		-	-	-	-	0 Orang		0 Orang		0.00%		
7.01.05.2.0 1.0005						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan [1756]			8,039				7.691		1.61		-	-	-	-	1.61		1.61		20,02%
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan [5027]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-	-	-	-	3 Laporan		3 Laporan		25.00%		



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bubutan Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Bubutan Kota Surabaya di dukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bubutan tahun 2025 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Bubutan Tahun 2025 dirumuskan dalam 5 (lima) program terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rencana Program,

Kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bubutan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan output namun ada penyesuaian anggaran. Perubahan Renja Kecamatan Bubutan tahun 2025 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Bubutan
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12%	23,436,791,962	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.12%	23,667,423,745	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,752,594,721	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	19,290,118,051	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19,752,594,721	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	19,290,118,051	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	3,573,363,441	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100%	4,281,741,930	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	3,573,363,441	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bubutan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,281,741,930	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	110,833,800	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100%	95,563,764	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	110,833,800	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	95,563,764	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	191,099,498	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%	191,099,498	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37%				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.37%		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4,500,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	4,500,000	



		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	KECAMATAN BUBUTAN 414 Lembaga	167,706,400		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	167,706,400	
		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,706,400		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	167,706,400	
		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	18,893,098		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	18,893,098	
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	1,132,200		7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Bubutan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	40 Dokumen	1,132,200	
		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,023,089		7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	10,023,089	
		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,737,809		7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,737,809	
3		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	20,649,016,547		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	87.50%	20,646,687,347	
				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%		
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,492,848,547		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,488,948,547	
				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan		
		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10,800,000		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Bubutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6,900,000	
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	2,021,933,933		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	2,021,933,933	



			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1,611,278,391	KECAMATAN BUBUTAN		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,622,620,714	
			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3,876,388,820			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,929,768,820	
			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,415,206,277			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,415,206,277	
			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	2,751,399,209			7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,751,399,209	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	602,509,249			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Alun-Alun Contong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	602,509,249	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,451,375,765			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bubutan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,440,033,442	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,341,540,000			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gundih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,288,160,000	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,356,600,000			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Jepara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,356,600,000	
			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,053,816,903			7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	2,053,816,903	
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	156,168,000			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	44 Lembaga	157,738,800	
					Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	460 Lembaga						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	304 Lembaga		
			7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	140,448,000			7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Bubutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	44 Unit	153,238,800	
			7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	15,720,000			7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	4,500,000	
4			7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	143,153,400	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	143,153,400	
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	143,153,400			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	143,153,400	



			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN BUBUTAN 12 Laporan	143,153,400			7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143,153,400	
5			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	20,946,550			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	13,146,550	
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	20,946,550			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	13,146,550	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
			7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	13,256,000			7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Bubutan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	5,456,000	
			7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,690,550			7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- U ndangan	Kec. Bubutan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	7,690,550	



Kecamatan Bubutan turut berperan dan berkontribusi dalam pencapaian Misi Kota Surabaya. Pada Tahun 2025 Kecamatan Bubutan memiliki 5 (lima) program yang dilaksanakan yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini memiliki indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan target capaian 96,12% dan pagu indikatif sebesar 23,667,423,745. Program ini memiliki kegiatan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian 100 % dan pagu indikatif sebesar 19,290,118,051;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target capaian 100 % dan pagu indikatif sebesar 4,281,741,930;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dengan target capaian 100 % dan pagu indikatif sebesar 95,563,764.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program ini memiliki indikator Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah, Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat. Program ini memiliki kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait indikator Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan dengan target capaian 1 laporan dan pagu indikatif sebesar 4,500,000;
 - b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan dengan target capaian 12 laporan dan pagu indikatif sebesar 167,706,400;



- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan indikator Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani dengan target capaian 40 dokumen dan pagu indikatif sebesar 1,132,2000;
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan indikator Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani dengan target capaian 12 dokumen dan pagu indikatif sebesar 10,023,089;
 - e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan target capaian 12 Laporan dan pagu indikatif sebesar 7,737,809.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program ini memiliki indikator Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi dan Persentase kelurahan. Program ini memiliki kegiatan :
- a. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan target capaian 10 lembaga kemasyarakatan dan pagu indikatif sebesar 6,900,000;
 - b. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan target capaian 5 Kelurahan dan pagu indikatif sebesar 13,740,928,953;
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan dengan target capaian 5 Kelurahan dan pagu indikatif sebesar 6,741,119,594;
 - d. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan dengan target capaian 44 unit dan pagu indikatif sebesar 153,238,800;
 - e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan target capaian 6 laporan dan pagu indikatif sebesar 4,500,000.



- D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Program ini memiliki indikator Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan. Program ini memiliki kegiatan :
- a. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target capaian 12 laporan dan pagu indikatif sebesar 143,153,400;
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini memiliki indikator Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan .Program ini memiliki kegiatan :
- a. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan indikator Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT dengan capaian 20 orang dan pagu indikatif sebesar 5,456,000;
 - b. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT dengan capaian 12 laporan dan pagu indikatif sebesar 7,690,550.







BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Bubutan Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bubutan pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Bubutan Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 07 Agustus 2025
Camat Bubutan



FERDIE ARDIANSYAH, S.STP., M.Si
Pembina Tk I
IV/b
NIP. 198102051999121003

